

PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH

Junita Sari, Denny Sumantri Mangkuwinata^{*)}

^{*)}Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim, Bireuen

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh Tahun 2002-2016. Adapun variabel makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, inflasi, Upah Minimum Regional (UMR) dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan berupa time series (tahun 2002-2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh dengan menggunakan data selama 15 tahun yaitu tahun 2002–2016. Dan objeknya pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2002-2016. Dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dibantu oleh software IBM SPSS Versi 17.0. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial (uji t) untuk inflasi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.929 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel inflasi yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.929 < 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Sedangkan untuk Upah Minimum Regional (UMR), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.372 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel UMR yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.372 > 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial UMR berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan pengangguran diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.104 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel pengangguran yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.104 < 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan berdasarkan secara simultan (uji f) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3.550 dan F_{tabel} sebesar 3.49. Dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3.550 > 3.49$. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut inflasi, UMR dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Kata Kunci : Inflasi, Upah Minimum Regional (UMR), Pengangguran, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan sangatlah serius, hal tersebut dapat

dilihat dari segi banyaknya program yang dijalankan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah antara lain inflasi, Upah Minimum Regional (UMR) dan pengangguran

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional. Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Adapun tingkat kemiskinan di provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh (2000-2016)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat kemiskinan (%)
2000	4.073.000	15.20
2001	4.114.000	19.20
2002	4.166.040	29.83
2003	4.218.486	29.76
2004	4.075.599	28.47
2005	4.031.589	28.69
2006	4.153.573	28.28
2007	4.223.833	26.65
2008	4.293.915	23.55
2009	4.363.477	21.80
2010	4.494.410	19.95
2011	4.597.308	19.48
2012	4.693.934	18.58
2013	4.791.924	17.72
2014	4.906.835	16.98
2015	5.001.953	17.11
2016	5.096.248	16.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 4.073.000 jiwa tingkat kemiskinan sebesar 15.20%. Pada tahun 2001 dengan jumlah penduduk 4.114.000 jiwa, kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 19.20%. Tahun 2002 kemiskinan meningkat menjadi sebesar 29.83%, tahun 2003 mengalami sedikit penurunan menjadi 29.76%. Kemudian pada 2004 jumlah penduduk mengalami penurunan karena terjadinya bencana tsunami, jumlah penduduknya 4.075.599 jiwa, persentase tingkat kemiskinan mejadi sebesar 28.47%. Hal ini disebabkan oleh bencana tsunami yang menimpa Provinsi Aceh. Tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 28.69% dengan jumlah penduduk 4.031.589 jiwa. Tahun

2006 sebesar 28.28%, jumlah penduduknya 4.153.573 jiwa. Dan tahun 2007 dengan jumlah penduduk 4.223.833 jiwa, tingkat kemiskinan sebesar 26.65%. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh cenderung mengalami penurunan. Dari 23.55% pada 2008 menjadi 16.98% pada tahun 2014. Tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 5.001.953 jiwa, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 17,11%. Dan tahun 2016 jumlah penduduk 5.096.248 jiwa, kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 16.43%. Sedangkan laju inflasi di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 2. Persentase Inflasi Di Provinsi Aceh (2000-2016)

Tahun	Inflasi (%)
2000	9.59
2001	14.03
2002	10.55
2003	4.03
2004	7.08
2005	34.88
2006	9.98
2007	9.41
2008	11.92
2009	3.72
2010	5.86
2011	3.43
2012	0.22
2013	7.31
2014	8.09
2015	1.53
2016	3.95

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan inflasi di Aceh menunjukkan kondisi yang tidak stabil,. Pada tahun 2000 persentase inflasi sebesar 9.59 persen kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 14.03 persen. Dan kembali mengalami penurunan, pada tahun 2002 sampai dengan 2004. Tahun 2005 persentase inflasi semakin meningkat sebesar 34.88 persen. Inflasi meningkat disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya, serta transportasi, komunikasi, jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan juga kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Selanjutnya di tahun 2006 kembali berkurang menjadi sebesar 9.98 persen. Pada tahun 2007

sebesar 9.41 persen. Kembali meningkat tahun 2008 menjadi sebesar 11.92 persen, tahun 2009 sebesar 3.72 persen. Dan pada tahun 2010 menjadi sebesar 5.86 persen. Pada tahun 2011 persentase inflasi sebesar 3.43 persen, tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dan tahun 2013 sebesar 7.31 persen. Selanjutnya di tahun 2014 inflasi di Provinsi Aceh kembali meningkat sebesar 8.09 persen. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.53 persen. Dan pada tahun 2016 inflasi sebesar 3.95 persen.

Untuk perkembangan tingkat upah minimum di Provinsi Aceh, berdasarkan data Kemenakertrans dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perkembangan UMP Di Provinsi Aceh (2000-2016)

Tahun	UMP	%
2000	Rp. 265.000	55
2001	Rp. 300.000	13.2
2002	Rp. 330.000	10
2003	Rp. 425.000	28.8
2004	Rp. 550.000	29.4
2005	Rp. 620.000	12.7
2006	Rp. 820.000	32
2007	Rp. 850.000	3.66
2008	Rp. 1.000.000	17.6
2009	Rp. 1.200.000	20
2010	Rp. 1.300.000	8.33
2011	Rp. 1.350.000	3.85
2012	Rp. 1.400.000	3.70
2013	Rp. 1.550.000	10.70
2014	Rp. 1.750.000	12.90
2015	Rp. 1.900.000	8.57
2016	Rp. 2.118.500	11.5

Sumber : Kemenakertrans, 2017

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan tingkat penetapan upah minimum rata-rata terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2000 tingkat upah minimum sebesar Rp. 265.000 meningkat sebanyak 55%, tahun 2001 naik menjadi Rp. 300.000 meningkat sebanyak 13.2%. Hingga pada tahun 2008 tingkat upah menjadi sebesar Rp. 1.000.000, peningkatannya sebesar 17.6%, dan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2016, dari Rp. 1.900.000 di tahun 2015 menjadi Rp. 2.118.500

pada tahun 2016. Kenaikan upah minimum dinilai wajar karena memang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya.

Begitupun halnya dengan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh yang sering mengalami fase naik turun.. Tingkat pengangguran di Provinsi Aceh berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional yaitu sebesar 5.81 persen pada tahun 2015. Berikut tabel 1.3 memperlihatkan persentase tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh (2000-2016)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pengangguran (%)
2000	4.073.000	4.80
2001	4.114.000	7.71
2002	4.166.040	9.34
2003	4.218.486	8.97
2004	4.075.599	9.35
2005	4.031.589	14.00
2006	4.153.573	10.43
2007	4.223.833	9.84
2008	4.293.915	9.56
2009	4.363.477	8.71
2010	4.494.410	8.37
2011	4.597.308	9.00
2012	4.693.934	9.06
2013	4.791.924	10.12
2014	4.906.835	9.02
2015	5.001.953	9.93
2016	5.096.248	7.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Aceh sebesar 4.073.000 jiwa, dengan tingkat pengangguran sebesar 4.80 persen. Pada 2001 dengan jumlah penduduk 4.114.000 jiwa, pengangguran sebesar 7.71 persen. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 tingkat pengangguran mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pasar tenaga kerja tidak dapat menyerap dengan baik peningkatan jumlah angkatan kerja. Ditahun 2006 jumlah penduduk sebesar 4.153.573 jiwa, pengangguran menjadi 10.43 persen, dan tahun 2007 sampai tahun 2011 tingkat pengangguran kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2011 pengangguran meningkat menjadi sebesar 9.00 persen, dan kembali meningkat tahun 2012 sebesar 9.06 persen, tahun 2013 meningkat sebesar 10.12 persen. Kemudian ditahun 2014 dengan jumlah penduduk sebesar 4.906.835 jiwa, tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 9.02 persen. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah angkatan kerja yang meningkat dapat diserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan penduduk yang bekerja dan berkurangnya jumlah pengangguran. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 9.93 persen dan jumlah penduduknya 5.001.953 jiwa. Kemudian ditahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.57

persen dengan jumlah penduduk sebanyak 5.096.248 jiwa.

Untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah Provinsi Aceh sudah melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan program perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Melihat perkembangan angka kemiskinan, yang berada pada posisi 17% pada tahun 2015, maka dapat diketahui penanggulangan kemiskinan Aceh belum mampu untuk mencapai target yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu menata kembali kebijakan-kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Variabel Makro Ekonomi

Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Variabel-variabel tersebut terdiri dari (Nanga, 2011:22):

1. Pendapatan Nasional
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.
2. Kesempatan Kerja Atau Pengangguran

Kesempatan kerja adalah semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu. Dan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Wijayanto, 2010:58).

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja (Khabibi, 2013:49).

4. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa di perluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang. Misalnya deposito berjangka, simpanan tabungan pada bank dan lain-lain.

5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2011).

7. Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran internasional adalah transaksi yang sistematis yang dicatat didalam ringkasan yang digunakan oleh penduduk atau negara untuk jangka waktu tertentu berupa transaksi barang dan jasa (Sunnyoto, 2014:54).

Definisi Inflasi

Menurut Mankiw (2012:52), inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua negara, menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Rizka (2015:6) Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada

satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain dipasar. Terus-menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja.

Selanjutnya Miskhin dalam Dharmayanti (2011:32), Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi secara umum dianggap sebagai masalah penting yang harus diselesaikan mengingat dampak bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang selalu meningkat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja) yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi juga merupakan suatu proses kenaikan harga dimana kenaikan tersebut berpengaruh atau berlaku di dalam suatu perekonomian. Bersamaan dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai mata uang turun secara tajam pula sebanding dengan harga-harga tersebut.

Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

Menurut Pratiwi (2013:12) hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun. Ketika harga meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun). Kedua, inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya.

Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan rumah tangga perusahaan karena lemahnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi (di atas 10%) dalam jangka panjang akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dan kelompok yang berpenghasilan menengah ke bawah, antara kelompok kaya dan kelompok miskin dan antara kelompok konglomerat dan kelompok pengusaha kelas menengah ke bawah yang semakin lama akan merusak tatanan (struktur) perekonomian dan melumpuhkan semua sektor ekonomi potensial untuk ekspor.

Bagi kelompok yang berpendapatan rendah apabila terjadinya inflasi maka akan mengalami penurunan daya beli yang dimiliki dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum, apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila masyarakat tingkat upahnya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, karena terjadi inflasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya (Nurfritri, 2011:21).

Definisi Upah Minimum

Menurut Sukirno (2012:102) mengartikan upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik dan mental dari tenaga kerja oleh pemberi kerja. Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Sedangkan menurut Khabibi (2013:49) upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.

Adapun menurut Dharmayanti, (2011:27). upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya

Disisi lain Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kelayakan suatu standar upah minimum yang dibayarkan harus didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini (Sukirno, 2012:105):

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
- b. Indek Harga Konsumen (IHK)
- c. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya

- d. Standar upah minimum didaerah sekitar
- e. Kondisi para pekerja
- f. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita

Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010).

Menurut Sukirno dalam Wijayanto (2010:58), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran juga merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.

Kesimpulannya, pengangguran adalah seseorang yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan serta memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran (Nanga, 2011:26).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup

tertentu. Di negara berkembang kemiskinan biasanya dihubungkan dengan masalah kemakmuran (*welfare economics*) yang merujuk pada konsumsi barang dan jasa (Kuncoro, 2011:23).

Menurut Wijayanto (2010:10), Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek, karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin seta buruknya lingkungan hidup. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran dan masalah lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.

Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Prastyo (2010:38), ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh dua macam. Pertama kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau sekelompok masyarakat yang merasa tidak miskin. Kedua, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan yang hasilnya tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Selanjutnya menurut Kuncoro (2011:154) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan,

muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Logikanya adalah negara miskin itu miskin karena dia miskin.

Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dari uraian permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan

H₂ : Upah minimum regional berpengaruh positif terhadap kemiskinan

H₃ : Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah antar variabel independen mempunyai hubungan langsung (berkorelasi) sempurna. Jika iya, maka ketiga variabel independen tidak bisa digunakan secara bersama-sama sebagai variabel independen. Jika bebas dari masalah multikolinieritas, maka ketiga variabel independen tersebut layak untuk digunakan secara bersama-sama dalam pengujian regresi berganda.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat pada hasil Collinearity Statistics pada tabel Coefficients. Pada Collinearity Statistics tersebut terdapat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau variabel bebas.

Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi maka dapat dilihat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2012:157):

a. Melihat Nilai Tolerance

- Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai Tolerance lebih besar 0.10.
- Terjadi multikolinieritas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0.10.

- b. Melihat Nilai Variance Inflation Factor (VIF)
- Tidak terjadi mulktioleritas, jika nilai VIF lebih kecil 10.00.
 - Terjadi mulktioleritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10.00.
- Dengan demikian untuk melihat ada tidaknya mulktioleritas antar variabel bebas pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil output pengujian mulktioleritas berikut ini:

Tabel 5. Uji Mulktioleritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
X1= Inflasi	.243	4.118
X2=UMR	.995	1.005
X3=Pengangguran	.243	4.109

a. Dependent Variable: Y=Kemiskinan

Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tersebut tampak bahwa variabel bebas (inflasi, UMR, dan pengangguran) masing-masing memiliki nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10.00. Sehingga hasil pengujian membuktikan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen, dan terbebas dari gejala mulktioleritas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ada korelasi atau

hubungan antara kesalahan pengganggu pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi parameter yang estimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode nilai *Durbin Watson* . Untuk melihat hasil pengolahan data dalam mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.492	.353	4.19290	.886

a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1= Inflasi

Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS

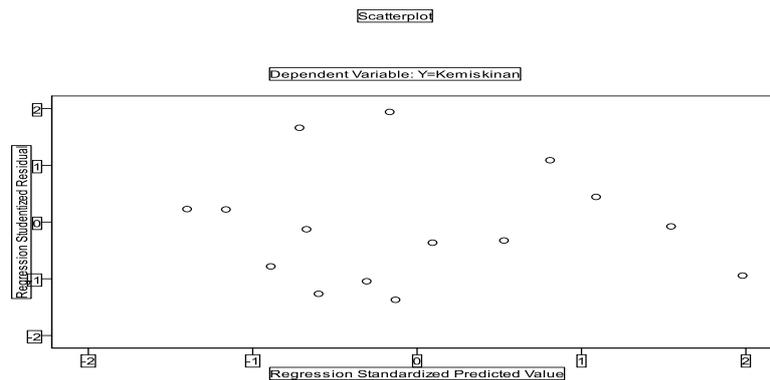
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 0.886. Bila nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti bebas dari autokorelasi, sehingga model dalam penelitian ini bebas autokorelasi karena nilai DW 0.886 yaitu berada diantara -2 sampai +2.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Apabila titik-titik pada grafik scatterplot

menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka model yang digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstanta dari setiap observasi ke observasi lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat pertumbuhan dala kondisi yang melatar belakanginya tidak terangkumnya dalam spesifikasi model.

Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat grafik scatterplot berikut ini:



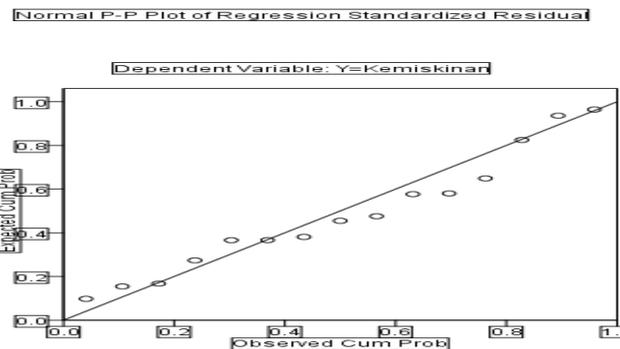
Gambar 1. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d.Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel

dependen, keduanya didistribusikan secara normal atau tidak normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan data (titik) pada *Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Grafik Pengujian Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar garis diagonal pada *Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual* sesuai gambar diatas, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada, maka peneliti melakukan analisis regresi linear berganda anatar variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Dimana yang menjadi variabel dependen adalah kemiskinan (Y) sementara yang menjadi variabel independen adalah inflasi (X1), upah minimum regional (X2) dan pengangguran (X3). Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dilihat output regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0 dan akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Hasil Regresi Persamaan Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	15.154	13.480		1.124	.285
X1= Inflasi	.259	.279	.405	.929	.373
X2=UMR	.283	.119	.511	2.372	.037
X3=Pengangguran	.167	1.595	.046	.104	.919

a. Dependent Variable: Y=Kemiskinan

Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS

Berdasarkan data dari tabel diatas apabila dimasukkan dalam model penelitian, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 15.154 + 0.259X_1 + 0.283X_2 + 0.167X_3$$

Dari persamaan model regresi diatas maka hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini diperoleh nilai konstanta yaitu 15.154. Artinya jika inflasi, UMR dan pengangguran dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan provinsi Aceh adalah sebesar 15.154 persen.
2. Diketahui nilai koefisien regresi inflasi (X1) sebesar 0.259. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1% maka perubahan dalam variabel inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 0.259 persen dengan asumsi variabel inflasi (X1) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Diketahui nilai koefisien regresi UMR (X2) sebesar 0.283. Artinya setiap kenaikan UMR sebesar 1% maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 0.283 persen dengan asumsi variabel UMR (X2) dianggap konstan atau tidak mengalami

perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa UMR berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

4. Diketahui koefisien regresi pengangguran (X3) sebesar 0.167. Artinya setiap kenaikan pengangguran sebesar 1% maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan diprovinsi Aceh sebesar 0.167 persen dengan asumsi variabel pengangguran (X3) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Pembuktian Hipotesis

Pembuktian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} maka variabel-variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	187.210	3	62.403	3.550	.051 ^a
Residual	193.385	11	17.580		
Total	380.595	14			

a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1=Inflasi

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	187.210	3	62.403	3.550	.051 ^a
Residual	193.385	11	17.580		
Total	380.595	14			

a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1=Inflasi

b. Dependent Variable: Y=Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.8, maka dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 3.550 dengan nilai signifikansi sebesar 0.051 dan F_{tabel} pada tingkat signifikan sebesar 5 % atau $\alpha = 0.05$. Sedangkan nilai F_{tabel} adalah sebesar 3.49 ($F_{tabel} = F(k; n-k)$). Hal ini menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3.550 > 3.49$. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut dapat diambil suatu keputusan bahwa inflasi, UMR dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Pembuktian Secara Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji T) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji T dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh inflasi, UMR, pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji T

Model	T	Sig.
(Constant)	1.124	.285
X1=Inflasi	.929	.373
X2=UMR	2.372	0.37
X3=Pengangguran	.104	.919

Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS

Untuk menguji pengaruh inflasi, UMR, pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Aceh secara parsial, dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 9 di atas. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel diatas, dapat diketahui besarnya nilai t_{hitung} untuk masing-masing variabel dengan tingkat signifikan $\alpha = 0.05$.

1. Inflasi (X1)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh inflasi (X1) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar $0.373 > 0.05$. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 0.929 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel inflasi yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.929 < 1.796$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

2. Upah Minimum Regional (UMR) (X2)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh UMR (X2) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar $0.037 < 0.05$. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.372 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji

t untuk variabel UMR yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.372 > 1.796$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial UMR berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

3. Pengangguran (X3)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh pengangguran (X3) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar $0.919 > 0.05$. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 0.104 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel pengangguran yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.104 < 1.796$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Koefisien Determinasi (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien dterminasi akan cenderung semakin besar apabila jumlah variabel dan jumlah data

yang di observasi semakin banyak. Oleh karena itu, maka digunakan ukuran *adjusted R²*, untuk menghilangkan bias akibat adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang di observasi. Dalam penelitian ini, koefisien

determinasi diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu inflasi, UMR dan pengangguran terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan di provinsi Aceh.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.701 ^a	.492	.353

a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1= Inflasi

b. Dependent Variable: Y=Kemiskinan

Dari hasil regresi pengaruh inflasi, UMR dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, maka diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.353 atau 35.3%. Hal ini berarti sebesar 35.30 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen (inflasi, UMR, dan pengangguran). Sedangkan sisanya sebesar (100% - 35.3% = 64.7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda terhadap variabel inflasi, Upah Minimum Regional (UMR), dan pengangguran. Data yang digunakan berupa *time series* tahun 2002-2016. Hasil dari pengolahan data didapatkan $Y = 15.154 + 0.259X_1 + 0.283X_2 + 0.167X_3$, dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0.353.

Dari persamaan model regresi linier berganda untuk variabel inflasi dapat dinyatakan nilai koefisien regresi inflasi (X1) sebesar 0.259. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1% maka perubahan dalam variabel inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 0.259 persen dengan asumsi variabel inflasi (X1) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Sementara itu hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Adanya hubungan yang negatif antara inflasi terhadap kemiskinan, karena adanya kondisi dan situasi di mana daya beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat heterogen atau tidak sama, sehingga selanjutnya

akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

Jarak inflasi antara Aceh dan nasional semakin mengecil, akan tetapi inflasi di Aceh masih tercatat lebih tinggi dari tingkat nasional. Inflasi yang tercatat sebesar 11 persen pada tahun 2015 disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan di pasar lokal, juga meningkatnya harga-harga komoditas internasional. Akan tetapi, inflasi yang terjadi pada tahun 2016 masih lebih tinggi dibanding tahun 2015. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode yang lain, dan tingkat inflasi berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Dari persamaan model regresi linier berganda untuk variabel Upah Minimum Regional (UMR) nilai koefisien regresi UMR (X2) sebesar 0.283. Artinya setiap kenaikan UMR sebesar 1% maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 0.283 persen dengan asumsi variabel UMR (X2) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam

penelitian ini dapat disebutkan bahwa UMR berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Sedangkan pengujian secara parsial, variabel UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2002-2016. Dari hasil pengolahan data, hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, semakin meningkat tingkat upah minimum maka pendapatan masyarakat juga meningkat, dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung upah minimum memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum regional di provinsi Aceh selalu meningkat setiap tahunnya.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Dari persamaan model regresi linier berganda untuk variabel pengangguran nilai koefisien regresi pengangguran (X_3) sebesar 0.167. Artinya setiap kenaikan pengangguran sebesar 1% maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sebesar 0.167 persen dengan asumsi variabel pengangguran (X_3) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2002-2016.

Sedangkan berdasarkan pengujian secara parsial, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dalam kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengolahan data dapat diketahui nilai persamaan regresi berganda yaitu $Y = 15.154 + 0.259X_1 + 0.283X_2 + 0.167X_3$ dengan nilai adjusted R^2 0.353.
2. Hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa inflasi, Upah Minimum Regional (UMR) dan pengangguran berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2002-2016.

3. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan pengangguran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2002-2016.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi kebijakan yang tepat antara pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih konsisten dan fokus dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Dan yang berhubungan dengan pengangguran dan juga kemiskinan, pemerintah daerah perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Bagi akademisi yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut, hendaknya dapat menggunakan variabel bebas lain yang lebih relevan dengan kemiskinan, sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat untuk mengatasi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2010). *Pengukuran Kemiskinan Di Provinsi Aceh*.
- Badan Pusat Statistik, (2012). *Pengukuran Inflasi Di Provinsi Aceh*.
- Boediono, (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis*, BPF, Yogyakarta.
- Dharmayanti, Yeni. (2011). *Analisis Pengaruh PDRB Upah Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991-2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Firdaus, Muhammad. (2010). *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Bumi Aksara. Jakarta

- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. (2012). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Imelia. (2012). *Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi*.
- Khabibi, Achmad. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Surakarta: USM.
- Kuncoro, Mudrajad. (2011). *Ekonomika Pembangunan: Teori Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
- Kristanto, Dwi Prabowo. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kemenakertrans. (2017). *Perkembangan Upah Minimum Regional/Provinsi Di Indonesia*
- Marzuki. (2010). *Metodologi Riset*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Maipita, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Maksum, N.I Earlyanti. (2010). *Ekonomi SMA / MA Kelas XI*. Piranti Darma Kolakatama, Jakarta.
- Nasir. Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Utama.
- Nurfitri, Yanti. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2009*. Yogyakarta
- N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Asia. Penerbit Salemba Empat.
- Nanga, Muana. (2011). *Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nopirin. (2011). *Ekonomi Moneter*. BPF. Yogyakarta.
- Nugroho, Priyo Adi. (2015). *Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013*.
- Putong, Iskandar. (2010). *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Indonesia.
- Pratiwi, Ardianing. (2013). *Determinan Inflasi di Indonesia : Analisis Jangka Panjang dan Pendek*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Prastyo, Adit Agus. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, Rizka Febiana. (2015). *Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013*.
- Rahyuda. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta. Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Yogyakarta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. CV. Andi Offset.
- Sumarsono, Sonny. (2010). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, Danang, Erni. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Cetakan kedua. Yogyakarta.
- Sari, Cut Putri Mellita. (2015). *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2013*.
- Siti Walida Mustamin, Agussalim, Sri Undai Nurbayani. (2015). *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*.